

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

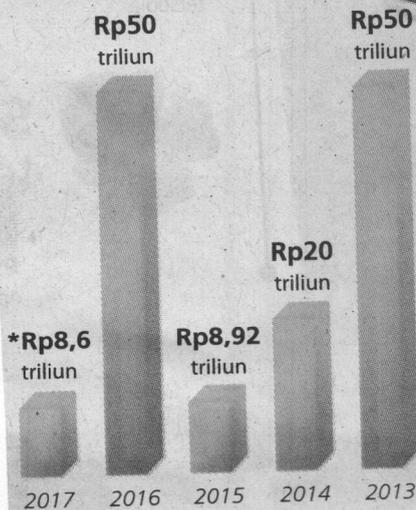
Halaman 8

Pemborosan Anggaran Belum Hilang

PERENCANAAN BUTUH PERBAIKAN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kementerian dan lembaga memperbaiki kualitas perencanaan anggaran setiap tahunnya. Dengan begitu, defisit anggaran bisa ditetapkan tidak terlalu besar dan penarikan utang pun bisa dikurangi.

Tingkat Pemborosan Belanja K/L dalam APBN

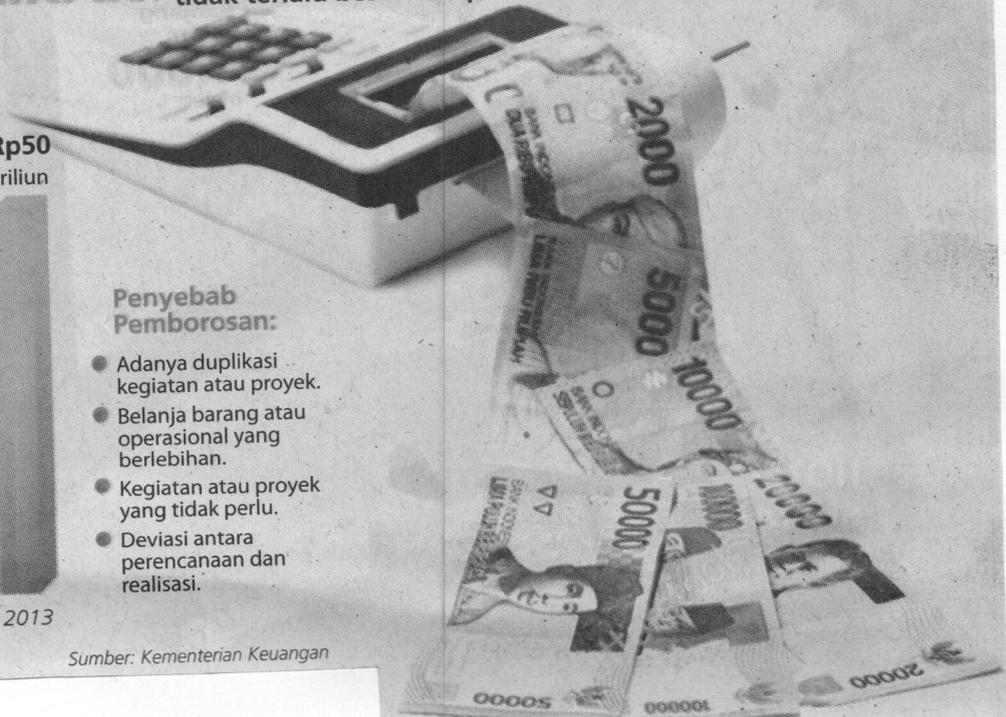


Penyebab Pemborosan:

- Adanya duplikasi kegiatan atau proyek.
- Belanja barang atau operasional yang berlebihan.
- Kegiatan atau proyek yang tidak perlu.
- Deviasi antara perencanaan dan realisasi.

*perkiraan

Sumber: Kementerian Keuangan



Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 8

Pemborosan Anggaran Belum Hilang

JAKARTA—Evaluasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap perencanaan belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN menemukan pemborosan akibat penetapan pagu yang berlebihan (*over-budgeting*) selama perencanaan belum hilang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu, tingkat pemborosan belanja K/L dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 diperkirakan mencapai Rp8,6 triliun. Meskipun belum hilang, angka ini terus turun dibandingkan APBN 2013 yang mencapai Rp50 triliun, APBN 2014 sebesar Rp20 triliun, APBN 2015 sebesar Rp8,92 triliun, dan APBN 2016 sebesar Rp50 triliun.

"Kami juga melihat rata-rata penyerapan anggaran sekitar 95%, bahkan kadang-kadang ada yang 92%. Jadi, ada 5% uang yang tidak dibelanjakan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Jakarta kemarin.

Sri Mulyani berharap K/L memperbaiki kualitas perencanaan anggaran setiap tahunnya. Dengan begitu, pemerintah tidak menetapkan defisit anggaran yang terlalu besar sehingga penarikan utang pun bisa dikurangi. Tidak hanya itu, kualitas pengelolaan anggaran juga mencerminkan martabat dan harga diri bangsa. "Ini mencerminkan karakter bangsa. Perencanaan dan pertanggungjawaban yang amburadul berarti negara dikelola secara amburadul," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, Presiden juga memerintahkan agar penyerapan belanja bisa dipercepat dan tidak menumpuk di akhir tahun. Kemenkeu sudah melakukan berbagai penyederhanaan kuantitas laporan dari 44 menjadi dua dan petunjuk teknis dari 307 menjadi 87. "Kami persilakan para peng-

"Kami juga melihat rata-rata penyerapan anggaran sekitar 95%, bahkan kadang-kadang ada yang 92%. Jadi, ada 5% uang yang tidak dibelanjakan."

SRI MULYANI INDRAWATI
Menteri Keuangan

guna anggaran untuk mengkritisi lagi kalau ada prosedur yang tidak perlu," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Marwanto mengungkapkan, pemborosan terjadi karena adanya duplikasi kegiatan atau proyek. Pihaknya pun sebenarnya sudah melakukan evaluasi dini sebelum kegiatan atau proyek itu disetujui.

"Misalnya ada K/L yang bangun gedung di awal anggaran, nyabes, tapi tahun depan masih pakai dasar yang sama. Misalnya kebutuhannya lebih sedikit. Kami temukan ini awalnya Rp14 triliun, sekarang sudah kecil tapi masih ada Rp3,6 triliun," ujar Marwanto.

Selain itu, metode lain yang digunakan untuk mengevaluasi adalah *benchmarking*. Dia mengaku kerap menemukan belanja barang atau operasional suatu K/L yang berlebihan padahal spesifikasi objeknya sama, misalnya biaya listrik dengan gedung dan kapasitas muatan orang yang sama. "Sejauh ini inefisiensi belanja barang mencapai Rp254 miliar," ujarnya.

Marwanto menambahkan, berbagai kegiatan atau proyek yang menjadi "lemak" dalam anggaran pun harus dihilangkan. Pola ini terjadi tiap tahun. Tahun lalu Kemenkeu menerima hingga 22.000 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau rata-rata 255 revisi setiap K/L. Jika tidak direvisi, pagu anggaran pada akhir tahun bisa negatif.

"Deviasi antara perencanaan dan realisasi banyak terjadi pada kuartal II dan III ke batas bawah. Pas kuartal IV justru realisasi melonjak. Kalau ini terjadi pada minggu kedua atau ketiga bulan Desember, bisa jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ucapnya.

Marwanto pun berharap K/L serius memperbaiki perencanaan agar tidak *over-budgeting*. Di satu sisi, kondisi ekonomi yang tengah sulit membuat pemerintah kesulitan memperoleh pajak. Di sisi lain, K/L justru melakukan pemborosan anggaran. Pemerintah menginginkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Senada, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menilai, sebenarnya tidak ada alasan bagi K/L membuat perencanaan yang buruk. Pasalnya, Presiden telah menetapkan tenggat penyampaian DIPA pada Desember sebelum tahun berjalan. Artinya, K/L memiliki waktu yang cukup untuk membuat perencanaan yang bagus.

"Kalau perencanaan bagus, pelaksanaan solid, maka *output*-nya pun bagus. Pelaporannya pun bisa WTP (wajar tanpa pengecualian). Itu yang kami harapkan," pungkasnya.

● rahmat fiansyah